

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERIODE 2004-2010



Skripsi Oleh:

**SEPTIAN SAPUTRA
NIM 01071002005
Jurusan Ekonomi Pembangunan**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
2012**

S
352.407

R 24156/24706

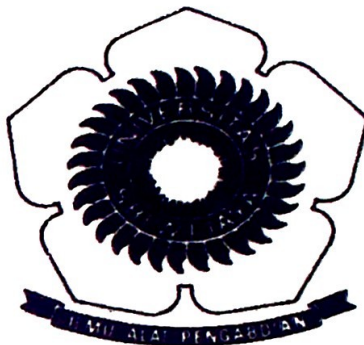
Sep

a

2012

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH ANTAR
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERIODE 2004-2010



Skripsi Oleh:

SEPTIAN SAPUTRA
NIM 01071002005
Jurusan Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih
Gelar Sarjana Ekonomi*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI
INDERALAYA
2012

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2004-2010

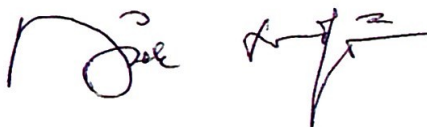
Disusun oleh:

Nama : Septian Saputra
NIM : 01071002005
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

Tanggal Persetujuan


Dosen Pembimbing



Tanggal : 23 Juni 2012

Ketua
Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Tanggal : 23 Juni 2012



Anggota
Anna Yulianita, SE, M.Si
NIP. 197007162008012015

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2004-2010

Disusun oleh:

Nama : Septian Saputra
NIM : 01071002005
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/Konsentrasi : Keuangan Daerah

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 24 Juli 2012 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.

Panitia Ujian Komprehensif
Indralaya, Juli 2012

Ketua

Anggota

Anggota

Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Anna Yulianita, SE, M.Si
NIP. 197007162008012015

Drs. Harunnurasyid, M. Com
NIP. 196002091989031001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Azwardi, SE, M.Si
NIP. 196805181993031003

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Septian Saputra

NIM : 01071002005

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian : Keuangan Daerah

Fakultas : Ekonomi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2004-2010

Pembimbing:

Ketua : Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si

Anggota : Anna Yulianita, SE, M.Si

Tanggal Ujian : 24 Juli 2012

adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, Saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Indralaya, Juli 2012
Pembuat Pernyataan,



Septian Saputra
NIM. 01071002005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul “Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2010”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat serjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Skripsi ini membahas mengenai kemandirian keuangan daerah yang dilihat dari berbagai aspek yaitu derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal dan peta kemampuan keuangan daerah. Penulis berharap kiranya skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang membacanya, sebagai bahan referensi tambahan kepada mahasiswa dan tokoh akademisi dalam mengembangkan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kemandirian keuangan daerah dan dapat memberikan gambaran informasi yang jelas kepada masyarakat pada umumnya.

Selama penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT atas keridhoan yang diberikan-Nya padaku.
2. Kedua orang tua dan kakak-kakakku tercinta yang selalu memberikan perhatian, kasih sayang, nasehat, bimbingan dan dukungan baik moril maupun materil selama ini sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si selaku dosen Pembimbing I skripsi yang telah memberikan perhatian dan dorongan melalui bimbingan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Anna Yulianita, SE, M.Si selaku dosen Pembimbing II skripsi yang telah memberikan perhatian dan dorongan melalui bimbingan dan saran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Drs. Harunnurasyid, M.Com selaku dosen penguji. Terima kasih atas saran dan masukannya atas kesempurnaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Azwardi, SE, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik sebagai pengganti Ibu Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, M.Si yang selalu membantu selama saya menempuh pendidikan di jenjang strata satu ini.
7. Bapak Drs. Nazeli Adnan, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
8. Ibu Dra. Hj. Sa'adah Yuliana, M.Si selaku dosen Pembimbing Akademik yang selalu membantu selama saya menempuh pendidikan di jenjang strata satu ini.
9. Ibu Prof. Dr. Hj. Badia Perizade, MBA selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
10. Bapak Prof. Dr. H. Syamsurijal, AK selaku Dekan Fakultas Ekonomi
11. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
12. Mbak Ita, Kak Adi, Kak Heru, Yuk Sumi serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
13. Dwi Renny Rahmawati yang selalu memberikan doa, dorongan semangat dan dukungan bagi penulis. Kamu adalah anugerah terindah yang pernah kumiliki.
14. Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman berorganisasi serta mengajarkan saya arti kebersamaan dan kekeluargaan.
15. Sahabat sejawatku Dwi, Feny, Rinda, Diba, Sheilla, Dina, Via serta Afif, Rio Gusti, Yosi, Didi, Zidin, Furqon, Nando, Defri, Ricky, Gerry, Zam, Aan, Eky dan Reza. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini saat suka maupun duka, "Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan".

16. Sobat ngefutsal Aga, Arif, Anton, Nopri, Firas, Panca, Rio Bagus, Yadi, Iqbal, Dika, Firli, Aam dan Ricky Rahmatullah. Jika tua nanti kita telah hidup masing-masing jadi ingatlah “hari ini”.
17. Teman-teman angkatan 2007 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

Indralaya, Juli 2012

Septian Saputra

ABSTRAK

Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Antar
Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Selatan
Periode 2004-2010

Oleh:
Septian Saputra

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemandirian keuangan daerah antar Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Selatan bila mana dilihat dari aspek derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal dan peta kemampuan keuangan daerah. Data yang digunakan adalah periode 2004 hingga 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat otonomi fiskal masing-masing kabupaten/kota tergolong sangat kurang (0% - 10%) hanya Kota Palembang tahun 2004 sampai 2010 derajat otonomi fiskalnya tergolong kurang (10,1% - 20%), kecuali tahun 2005 yang sangat kurang. Sedangkan perkembangan kapasitas fiskal mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hanya Kabupaten Ogan Komering Ilir, OKU Selatan, OKU Timur dan Empat Lawang yang tiap tahunnya mengalami peningkatan. Secara rata-rata kapasitas fiskal Kabupaten Musi Banyuasin yang terbesar, sedangkan yang terendah adalah Kabupaten OKU Selatan. Hasil upaya fiskal menunjukkan bahwa tingkat upaya fiskal berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku berfluktuasi tiap tahun. Berdasarkan persentase rata-rata tingkat elastisitas upaya fiskal, Kabupaten Lahat dan Muara Enim tidak elastis karena kurang dari 1 persen. Kalau dilihat dari peta kemampuan keuangan dengan metode kuadran, tidak ada satupun kabupaten/kota yang berada di kuadran I (kondisi ideal).

Kata kunci: derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal, upaya fiskal, peta kemampuan keuangan daerah

ABSTRACT

An Analysis of Financial Self-sufficiency Among Countries/Cities
in South Sumatera Province in 2004-2010

By:

**Septian Saputra; (1) Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si
(2) Anna Yulianita, SE, M.Si**

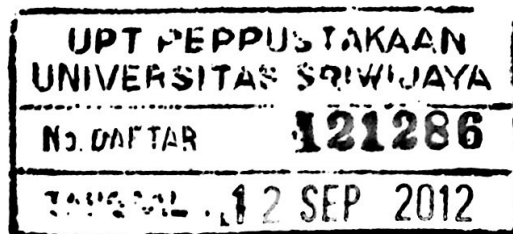


This study is aimed at identifying the self-sufficiency among countries/cities in South Sumatera viewed from their respective fiscal autonomy level, capacity, effort and capability. The data covered the years of 2004 to 2010. The results show that fiscal autonomy level of each country/city was very low (0%-10%) except Palembang that fell in that of low (10,1%-20%). However, Palembang also fell in the very low level in 2005. Meanwhile, development of fiscal capacity fluctuated every year. Only countries of Ogan Komering Ilir, OKU Selatan, OKU Timur and Empat Lawang improved their fiscal capacity steadily. By average, Musi Banyuasin Country showed the largest one, OKU Selatan the lowest. The fiscal effort viewed from the regional gross domestic product fluctuated too. By average of fiscal effort, Lahat and Muara Enim countries did not show any elasticity as shown by less than 1% indicator. All countries/cities did not show any fiscal capability; none fell in the first quadrant (the ideal condition).

Key words: level of fiscal autonomy, capacity, effort, mapping of financial regions

RIWAYAT HIDUP

- Nama Mahasiswa** : Septian Saputra
- Jenis Kelamin** : Laki-Laki
- Tempat/ Tanggal Lahir** : Palembang/ 13 September 1989
- Agama** : Islam
- Status** : Belum Menikah
- Alamat Rumah** : Jalan Sei Hitam Lrg. Angkatan 66 II No. 56 RT 21
RW 07 No. 56 Kel. Bukit Lama Kec. Ilir Barat I
Bukit Besar, Palembang
- Alamat E-mail** : tian_galing@yahoo.co.id
- Pendidikan Formal:**
- Sekolah Dasar** : SD Negeri 93 Palembang (1995-2001)
- SMP** : SMP Negeri 17 Palembang (2001-2004)
- SMA** : 1. SMA Sriwijaya Negara Palembang (2004-2005)
2. SMA Olahraga Negeri Sriwijaya Palembang
(2005-2007)
- Perguruan Tinggi** : S1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi Universitas Sriwijaya (2007-2012)
- Pendidikan Non Formal** :
- Pendidikan Komputer Microsoft Office Profesional di Lami Komputer 2008
- Pengalaman Organisasi** :
- Pengurus Harian Himpunan Mahasiswa Ekonomi Pembangunan (HIMEPA) sebagai anggota Divisi Keilmuan (2008-2010).
- Penghargaan Prestasi** :
- Atlet Cabang Olahraga Panahan (Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional) POMNAS XI Sumatera Selatan (2009).



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Sistematika Skripsi.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori.....	10
2.1.1. Otonomi Daerah	10
2.1.2. Anggaran Daerah	13
2.1.3. Hubungan Pusat dan Daerah	15

2.1.4. Desentralisasi Daerah.....	17
2.1.5. Desentralisasi Fiskal.....	18
2.1.6. Keuangan Daerah.....	22
2.1.7. Sumber-sumber Pendapatan Daerah.....	26
2.1.7.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	27
2.1.7.2. Dana Perimbangan.....	30
2.1.7.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah.....	33
2.1.8. Derajat Desentralisasi Fiskal.....	33
2.1.9. Kapasitas Fiskal.....	35
2.2. Penelitian Sebelumnya.....	36
2.3. Kerangka Pemikiran.....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
3.1. Ruang Lingkup Penelitian.....	41
3.2. Rancangan Penelitian.....	41
3.3. Sumber Data.....	41
3.4. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	42
3.5. Teknik Analisis.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Hasil Penelitian.....	47
4.1.1 Gambaran Umum Propinsi Sumatera Selatan.....	47
4.1.2. Penduduk.....	49
4.1.3. Keuangan Daerah.....	52
4.1.4. Pertumbuhan Ekonomi.....	57
4.1.5. Belanja Daerah.....	63
4.2. Pembahasan.....	64
4.2.1. Analisis Derajat Otonomi Fiskal (DOF).....	64
4.2.2. Analisis Kapasitas Fiskal.....	67
4.2.3. Analisis Upaya Fiskal.....	69
4.2.4. Analisis Peta Kemampuan Keuangan Daerah.....	71

4.2.4.1. Pertumbuhan (<i>Growth</i>) Pendapatan Asli Daerah	71
4.2.4.2. Peran (<i>Share</i>) PAD Terhadap APBD	72
4.2.4.3. Peta Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Metode Kuadran	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
5.1. Kesimpulan	77
5.2. Saran.....	79
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	79
Daftar Pustaka	80
Lampiran	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Struktur PAD Propinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2010	5
Tabel 3.1 Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran.....	46
Tabel 4.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Perkotaan dan Desa Menurut Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2010	48
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2010	50
Tabel 4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001-2010	51
Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010	53
Tabel 4.5 Kontribusi PAD Kabupaten/Kota Terhadap PAD Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004-2010.....	55
Tabel 4.6 Realisasi Penerimaan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004-2010.....	55
Tabel 4.7 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004-2010.....	57
Tabel 4.8 PDRB Per Sektor Propinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2004-2010.....	59

Tabel 4.9 PDRB Per Sektor Propinsi Sumatera Selatan Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2004-2010	59
Tabel 4.10 Laju Pertumbuhan PDRB ADHB Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010	61
Tabel 4.11 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010	61
Tabel 4.12 Realisasi Belanja Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2009 dan 2010	64
Tabel 4.13 Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010	65
Tabel 4.14 Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010	67
Tabel 4.15 Upaya Fiskal PDRB ADHB Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2010	69
Tabel 4.16 Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2010	72
Tabel 4.17 Peran PAD Terhadap APBD Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2010	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Perkembangan PAD dan Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010	6
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	39
Gambar 3.1 Peta Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran	45
Gambar 4.1 Laju Pertumbuhan PDRB Per Sektor Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2010	62
Gambar 4.2 Rata-rata Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010	66
Gambar 4.3 Rata-rata Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010	68
Gambar 4.4 Rata-rata Upaya Fiskal PDRB ADHB Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2010	70
Gambar 4.5 Peta Kemampuan Keuangan Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Metode Kuadran	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Komponen PAD Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan	
Periode 2004-2010		83
Lampiran 2	Kontribusi PAD Kabupaten/Kota Terhadap PAD Provinsi	
Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2004-2010.....		91
Lampiran 3	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten/Kota Propinsi	
Sumatera Selatan Tahun 2004-2010		96
Lampiran 4	Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Selatan	
Tahun 2004-2010		101
Lampiran 5	Upaya Fiskal PDRB ADHB Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera	
Selatan Tahun 2004-2010		109
Lampiran 6	Pertumbuhan (<i>Growth</i>) dan Peran (<i>Share</i>) Kabupaten/Kota	
Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010		115



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelolah, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Secara konkrit pengaturan tentang otonomi daerah terdapat di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan kedua undang-undang tersebut adalah pemahaman tentang pemberian wewenang yang lebih luas kepada daerah dan kejelasan perimbangan keuangan pusat dan daerah menjadi sangat penting bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, karena dengan pemahaman yang tepat dan benar maka upaya pemberian otonomi akan menjadi efektif dan efisien. Sebaliknya bila pemahaman yang keliru maka pemberian otonomi akan menambah beban daerah.

Pemberian otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat karena pada dasarnya terkandung tiga misi utama sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah tersebut yaitu (Mardiasmo, 2004: 59): (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas

pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Pelaksanaan otonomi daerah akan mendorong daerah menjadi semakin mandiri di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. Otonomi daerah juga diharapkan dapat membuat kinerja atau pencapaian hasil kerja dari daerah akan menjadi lebih baik. Untuk melihat kinerja keuangan daerah dapat dilakukan dengan menganalisis derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal dan upaya fiskal. Jika mekanisme tersebut sudah terwujud maka kemandirian daerah bisa terwujud.

Kebijakan dan pelaksanaan otonomi daerah yang ditujukan guna meningkatkan kemandirian dan kreativitas daerah dalam mengatur dan menangani urusan daerah mempunyai tiga strategi utama yaitu (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), 2011: 3):

1. Pertanggungjawaban lebih bersifat horizontal melalui peningkatan peran DPRD.
2. Pengaturan yang jelas mengenai alokasi dana dari pusat ke daerah.
3. Kewenangan pengelolaan keuangan diberikan secara utuh kepada daerah dengan mengedepankan pada asas partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dan kemampuan yang menggali

sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin mantap, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalan sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat (Davey, 1998: 95).

Di sisi lain saat ini kemampuan keuangan beberapa pemerintah daerah masih sangat tergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, bersamaan dengan semakin sulitnya keuangan negara dan pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, maka kepada setiap daerah dituntut harus dapat membiayai diri sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikuasainya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah (Halim, 2004: 21-22).

Kendala utama yang dihadapi pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah adalah minimnya pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi yang rendah menyebabkan pemerintah daerah memiliki derajat kebebasan rendah dalam mengelola keuangan daerah. Sebagian besar pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan, dibiayai dari dana perimbangan, terutama Dana Alokasi Umum (Isdijoso & Wibowo, 2002: 37).

Peningkatan PAD sangat menentukan sekali dalam penyelenggaraan otonomi daerah karena semakin tinggi PAD disuatu daerah maka daerah tersebut akan menjadi mandiri dan mengurangi ketergantungan kepada pusat sehingga daerah tersebut mempunyai kemampuan untuk berotonomi. Jadi PAD merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. Biasanya penerimaan PAD untuk masing-masing daerah berbeda dengan yang lainnya, rendahnya PAD merupakan indikasi nyata dimana masih besarnya ketergantungan daerah kepada pusat terhadap pembiayaan pembangunan baik langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut disebabkan di samping rendahnya potensi PAD di daerah juga disebabkan kurang intensifnya pemungutan pajak dan retribusi di daerah.

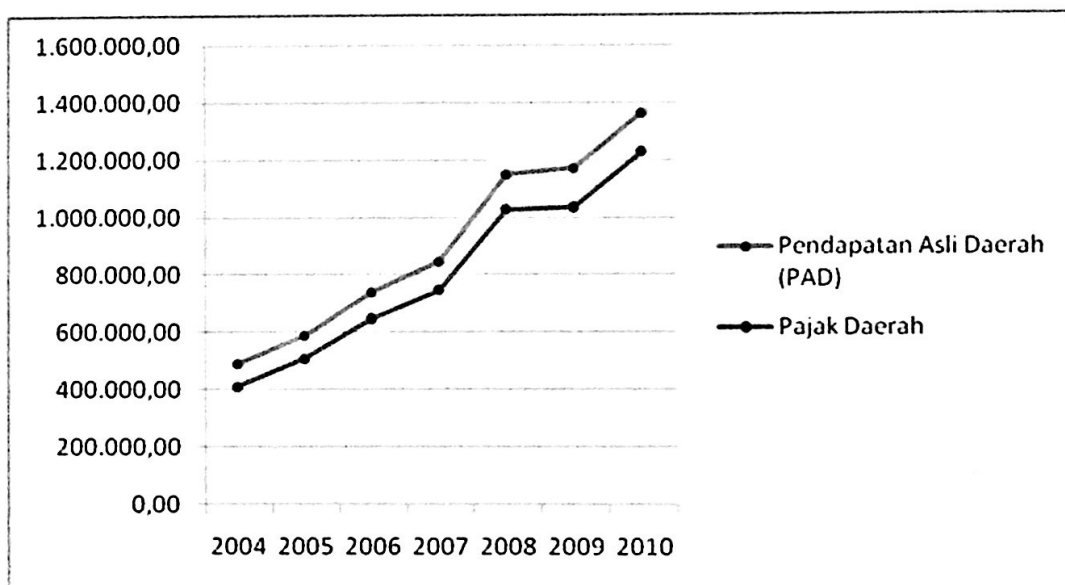
Untuk Provinsi Sumatera Selatan biaya pembangunan diperoleh dari dua sumber yaitu APBN dan APBD. Kontribusi APBD terhadap total anggaran pembangunan lebih rendah dibandingkan APBN. Tabel 1.1 menunjukkan perkembangan struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2004-2010 yang secara umum mengalami peningkatan.

Tabel 1.1 Perkembangan Struktur PAD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2010

Tahun	Hasil								Total PAD	
	Pajak Daerah		Retribusi Daerah		Pengelolaan Kekayaan Daerah		Lain-lain PAD Yang Sah			
	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)	Nilai (Rp. Juta)	(%)
2004	413.657,15	83,9	4.707,56	1,0	13.695,67	2,8	61.072,16	12,4	493.132,55	100
2005	511.334,75	86,6	4.011,30	0,7	16.995,27	2,9	58.434,90	9,9	590.776,22	100
2006	650.294,06	87,6	5.575,68	0,8	21.209,41	2,9	65.183,44	8,8	742.262,59	100
2007	748.372,10	88,3	11.207,43	1,3	32.977,13	3,9	55.262,90	6,5	847.970,78	100
2008	1.026.920,25	89,3	13.499,02	1,2	42.442,00	3,7	67.550,16	5,9	1.150.411,32	100
2009	1.035.105,00	88,2	13.093,28	1,1	42.600,00	3,6	82.970,00	7,1	1.173.768,28	100
2010	1.226.713,00	90,0	15.649,00	1,1	58.022,00	4,3	62.780,44	4,6	1.363.164,44	100
Rata-rata	801.770,90	87,68	9.677,61	1,02	32.563,07	3,43	64.750,57	7,87	908.783,74	100

Sumber: Badan Pusat Statistik, Sumsel Dalam Angka (ditolah)

Struktur PAD Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010 mengindikasikan bahwa sumber utama PAD berasal dari pajak daerah. Perkembangan struktur PAD menunjukkan bahwa rata-rata sumbangan pajak daerah terhadap PAD adalah sebesar 87,68 persen per tahun, rata-rata sumbangan retribusi daerah terhadap PAD adalah 1,02 persen per tahun, hasil pengelolaan kekayaan daerah 3,43 persen per tahun dan lain-lain PAD yang sah 7,87 persen per tahun. Kondisi ini dapat diilustrasikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Perkembangan PAD dan Pajak Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2004-2010

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan memberikan indikasi yang baik bagi kemandirian keuangan daerah dan kemampuan keuangan daerah dalam mengatur tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka mempercepat pembangunan di segala bidang. Pemerintah daerah harus dapat mengidentifikasi kapasitas fiskal atau sumber-sumber yang dimilikinya serta mempunyai kemampuan untuk menyerap penghasilan daerah, baik dalam bentuk pajak maupun dalam bentuk lainnya dari sumber yang ada.

Selain itu tinggi rendahnya PAD dapat juga ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dan bagaimana pemerintah daerahnya untuk dapat mengembangkan PAD yang dapat dilihat dengan kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah, tingkat kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin dan kemandirian keuangan daerah yang akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah tersebut.

Suatu daerah otonom dikatakan mampu melaksanakan otonom terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya agar benar-benar menjadi daerah yang otonom, untuk itu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan harus seminimal mungkin ketergantungannya kepada pemerintah pusat dengan menjadikan Pendapatan Asli Daerah khususnya sebagai bagian yang signifikan bagi sumber keuangan daerah agar terciptanya kemandirian keuangan daerah yang akan meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. Berdasarkan dengan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2004-2010.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya fiskal antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan periode 2004-2010?

2. Bagaimanakah posisi peta kemampuan keuangan daerah antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan periode 2004-2010?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui derajat otonomi fiskal, kapasitas fiskal, dan upaya fiskal antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan periode 2004-2010.
2. Mengetahui posisi peta kemampuan keuangan daerah antar Kabupaten/Kota di Propinsi Sumatera Selatan periode 2004-2010.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat akademis

Dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dibidang ekonomi khususnya ekonomi pembangunan.

2. Manfaat operasional

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dalam mengambil kebijakan terutama yang berhubungan dengan kemandirian keuangan daerah.

1.5. Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, setiap bab dapat dirinci ke dalam sub-bab yang relevan dengan pembahasan bab. Secara garis besar, terdiri dari bab dengan urutan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dijelaskan tentang berbagai teori yang relevan dengan penelitian yaitu tentang otonomi daerah, anggaran daerah, hubungan pusat dan daerah, desentralisasi daerah, desentralisasi fiskal, keuangan daerah, sumber-sumber pendapatan daerah, derajat desentralisasi fiskal dan kapasitas fiskal. Serta penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran .

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, rancangan penelitian, sumber data, definisi operasional dan pengukuran variabel, dan teknik analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menerangkan gambaran umum obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan dari analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang ditarik dari analisis data dan pembahasan, serta saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

- Allers, Marteen A. and Ishemoi, Lewis J. 2008. Fiscal Capacity Equalisation In Tanzania. *Journal*.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 2009. *Keuangan Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: BPPK Depkeu.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. 2004-2010. *Kabupaten/Kota Dalam Angka*. Palembang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. 2004-2010. *PDRB Kabupaten/Kota*. Palembang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. 2004-2010. *PDRB Sumatera Selatan*. Palembang: BPS.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. 2004-2010. *Sumatera Selatan Dalam Angka*. Palembang: BPS.
- BAPPENAS. 2003. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah: Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah.
- Darise, Nurlan. 2009. *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP dan 15 Permendagri)*. Jakarta: Indeks.
- Davey, Kenneth. 1998. *Pembiayaan Pemerintah Daerah: Praktek-praktek Internasional dan Relevansinya bagi Dunia Ketiga*. Cetakan Pertama. Terjemahan oleh: Amanullah dkk. Jakarta. UI-Pres.
- Devas, N. 1995. *Keuangan Pemerintah daerah di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2011. *Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: DJPK Depkeu.
- Halim, Abdul. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Halim, Abdul, & Damayanti, Theresia Woro. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Hamzah, Ardi. 2008. Analisa Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Eonomi, Pengangguran, dan Kemiskinan: Pendekatan Analisis Jalur (Studi Pada 29 Kabupaten dan 9 Kota Di Propinsi Jawa Timur Periode 2001 – 2006). *Jurnal Ekonomi*.
- Haryanto, Joko Tri. 2005. Kemandirian Daerah Sebuah Perspektif Dengan Metode Path Analysis. *Jurnal Ekonomi*.
- Hidayat, Paidi, Wahyu Ario Pratomo, & D. Agus Harjito. 2007. Analisis Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota Pemekaran di Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 12 No. 3, Desember*.
- Isdijoso, Brahmantio, & Wibowo, Tri. 2002. Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: sektor pendidikan di Surakarta). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol. 6 No. 1, Maret*.
- Kaho, Joseph Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Landiyanto, Erlangga Agustino. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *CURES Working Paper No. 05/01, Januari*.
- Mangkoesobroto, Guritno. 2010. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Diambil pada 5 Februari 2012 dari http://www.ekonomirakyat.org/edisi_4/artikel_3.htm.
- _____. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Pujiati, Amin. 2006. Analisis Pertumbuhan Ekonomi di Karesidenan Semarang Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, 61-70*.
- Sidik, Machfud. 2002. *Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia)*. Makalah yang disampaikan dalam Seminar “Setahun

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia". Yogyakarta, 13 Maret.

Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Suhendra, Maman, & Amir, H. 2006. Fiscal Decentralization In Indonesia: Current Status and Future Challenges. *Jurnal Keuangan Publik Vol.4 No.2, September*.

Sumarsono, Hadi. 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah: Kasus Kota Malang (1999-2004). *JESP Vol.1, No.1*.

Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Andi Offset.

Susetyo, Didik. 2010. *Desentralisasi Fiskal, Kesenjangan Fiskal, dan Disparitas Regional*. Pidato Pengukuhan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan . Palembang. Universitas Sriwijaya (tidak dipublikasi).

Syamsi, Ibnu. 1994. *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara. Edisi Revisi*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.

Republik Indonesia. *Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

_____. *Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.

Yani, A. 2008. *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.